

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan masyarakat diberbagai bidang, merupakan usaha untuk dapat memperkecil/meniadakan keterbelakangan dan kemiskinan yang masih dirasakan sebagian rakyat Indonesia terutama masyarakat yang berdomisili di kelurahan / pedesaan.

Pada dasarnya Pembangunan Nasional bertujuan :

Untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.¹

Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut, Pemerintah bersama-sama dengan masyarakat melaksanakan pembangunan di berbagai bidang : ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan, dimana pelaksanaannya tetap didasarkan atas azas pemerataan di seluruh pelosok tanah air, sebagaimana yang diamanatkan oleh Garis-Garis Besar Haluan Negara No. IV/MPR/2000, bahwa :

Pembangunan masyarakat kelurahan perlu terus ditingkatkan terutama melalui pengembangan kemampuan sumber daya manusia termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat kelurahan. Sejalan dengan itu perlu ditingkatkan kemampuan masyarakat kelurahan untuk memproduksi serta mengolah dan memasarkan hasil produksinya sekaligus menciptakan lapangan kerja.

¹ Departemen Penerangan RI, *Tap. MPR-RI No.IV/MPR/ Tahun 2000*, hal. 19.

Dengan demikian masyarakat pedesaan makin mampu mengerahkan dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya segala dana dan daya bagi peningkatan pendapatan dan taraf hidupnya.²

Dari penjelasan tersebut dapat dikemukakan bahwa pembangunan di tingkat kecamatan dilaksanakan melalui prakarsa dan pembangunan kecamatan sangat ditentukan oleh partisipasi aktif dan prakarsa serta swadaya masyarakat itu sendiri. Di samping itu dijelaskan pula bahwa pembangunan pedesaan/kelurahan merupakan prioritas utama untuk dapat meningkatkan penghasilan masyarakat, terutama bagi anggota masyarakat yang pendapatannya relatif rendah, yakni : buruh tani, petani penggarap, nelayan, pengrajin, pedagang kecil dan lain-lain. Dengan meningkatnya penghasilan masyarakat, berarti kesejahteraan masyarakat semakin meningkat pula, sehingga dapat menimbulkan dampak positif, seperti meningkatnya tingkat pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

Dengan demikian pembangunan perekonomian masyarakat desa/kelurahan hanya akan terwujud jika pelaksanaannya mencerminkan keterpaduan antar unsur pemerintah sebagai pembina dan pembimbing, sedang unsur masyarakat sumber daya, prakarsa, swadaya dan partisipasi.

Disisi lainnya sebagai suatu perbandingan menarik dalam telaah ini adalah lokasi dari penelitian yang diajukan yaitu Kecamatan Bandar Khalifah Kecamatan Serdang Berdagai. Sebagai suatu daerah yang pembentukannya di awal tahun 2004, maka selain belum memiliki sarana dan prasarana juga efektivitas pelaksanaan

² Ibid, hal. 63.